

Submitted: Juli	Revised: Oktober	Accepted: November
-----------------	------------------	--------------------

Mosi Integral: Gagasan M. Natsir Dalam Mempersatukan Indonesia Tahun 1950

Syahrul Adli

Syahruladli.2021@student.uny.ac.id

Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan gagasan M.Natsir dalam memperjuangkan kembali negara kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya adalah negara federasi serikat yang terbagi menjadi 16 negara bagian melalui gagasan Mosi Integral. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mempelajari literatur-literatur yang ada yang kemudian dianalisis menjadi suatu rekonstruksi sejarah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah mosi integral merupakan gagasan yang membawa negara federasi serikat Indonesia yang terdiri dari 16 negara bagian mau untuk melebur kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk bisa tercapainya negara kesatuan tersebut M. Natsir terlebih dahulu harus melakukan perjalanan politik dari satu negara bagian ke negara bagian yang lain untuk menemukan solusi jalan keluar dari kekacauan negara pada saat itu. Gagasan Mosi Integral pada dasarnya merupakan keinginan rakyat Indonesia namun masih ada ketakutan akan akibat-akibat yang terjadi setelahnya. Namun, M. Natsir mampu meyakinkan pemerintah, parlemen dan orang-orang penting negara sehingga pada tanggal 3 April 1950 Gagasan tersebut dibacakan di depan parlemen RIS.

Kata kunci: Mosi Integral, M. Natsir, Orde Lama, Republik Indonesia Serikat

Abstract: This research aims to depict M. Natsir ideas in advocating for the restoration of the unitary state of the Republic of Indonesia, which was previously a federated state composed of 16 constituent states, through the concept of the integral motion. The method employed in this research is a literature study, involving the examination of existing literature which is then analyzed to reconstruct history. The findings of the research indicate that the integral motion is a concept that advocates for the reunification of the federated Indonesian state, consisting of 16 constituent states, into the Unitary State of the Republic of Indonesia. In order to achieve this unified state, M. Natsir first had to embark on a political journey from one constituent state to another, seeking solutions to the state's turmoil at that time. The concept of the Integral Motion essentially represented the aspirations of the Indonesian people, yet fears of the consequences that might ensue still lingered. However, M. Natsir was able to persuade the government, parliament, and key figures of the nation, leading to the presentation of this concept before the RIS (United State of Indonesia) parliament on April, 1950.

Keywords : Integral Motion, M. Natsir, Old Order,

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami masa panjang dan kelam menghadapi kolonialisme dan imperialisme. Tercatat di dalam sejarah Indonesia bahwa negara-negara asing yang pernah menancapkan imperialismenya di tanah air ini adalah Belanda, Spanyol, Inggris, Prancis dan Jepang. Upaya-upaya seperti militer dan diplomasi dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan untuk bisa bebas dari genggaman negara penjajah tersebut.

Keberhasilan Jepang dalam mendorong mundur pasukan Belanda dari Indonesia memberikan angin segar kepada Indonesia akan harapan kemerdekaan setelah Imamura memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia. Jepang juga memberikan suatu kebijakan-kebijakan yang satu sisi memberikan keleluasan dan kebesaran hati rakyat untuk memperoleh kemerdekaan seperti diperbolehkannya mengibarkan bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia raya dan menggunakan Bahasa Indonesia. Walaupun pada dasarnya kebijakan tersebut hanya untuk mengambil simpati rakyat bukan memberikan kemerdekaan untuk Indonesia. (Yasmis, 2007: 27)

Jepang berupaya untuk bisa mengambil simpati dan kepercayaan Indonesia dengan merealisasikan janji kemerdekaan yang diberikan dengan bentuk BPUPKI dan PPKI. BPUPKI melakukan persidangan dua kali sejak dibentuk yaitu pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Tanggal 10-16 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-undang dasar, rancangan bentuk negara, wilayah negara dan kewarganegaraan serta susunan pemerintahan Indonesia. Hasil yang didapatkan dalam sidang BPUPKI tersebut adalah rancangan UUD landasan dasar negara (Hery, 2009: 188-189). Undang-undang dasar yang telah disusun oleh BPUPKI kemudian disahkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari pasca kemerdekaan yang dipimpin oleh Ir. Soekarno (Wayan, 2019: 97). Dengan demikian, berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik*” dan UUD 1945 Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*” (Sulardi, 2012: 522)

Indonesia berhasil memperoleh kemerdekaan setelah proklamasi yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah kekuasaan Jepang atas Indonesia melemah dikarenakan kekalahan perang menghadapi pihak sekutu melalui serangan udara yang

dilancarkan di Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Dengan demikian Indonesia sudah menjadi negara yang berdaulat dan berdiri sendiri.

Perjuangan Indonesia memperoleh kemerdekaan tidak hanya sebatas tersebut. Pasca proklamasi kemerdekaan, Indonesia masih belum diakui sebagai negara yang merdeka. Karena dalam hukum internasional suatu negara dapat dikatakan merdeka harus jika sudah mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Hal ini sesuai dengan teori konstitutif hukum internasional yang melihat bahwa suatu negara dianggap lahir kembali sebagai suatu negara baru apabila telah diberi pengakuan oleh negara lain atau dalam bahasa lainnya adalah pengakuan secara *de jure* dan *de facto*, artinya sebuah negara belum dianggap ada sebagai negara baru apabila belum ada pengakuan dari negara lain (Libella, 2020: 168).

Hal ini yang menjadi tantangan baru untuk Indonesia pasca kemerdekaan dikarenakan harus mendapatkan pengakuan-pengakuan dari negara lain atas kemerdekannya. Dikarenakan Indonesia secara dunia internasional pasca kemerdekaan masih belum mendapatkan pengakuan negara lain yang artinya Indonesia masih belum bisa dianggap sebagai negara yang merdeka secara hukum internasional maka Belanda juga masih belum mau mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Pada 29 September 1945, Belanda kembali masuk ke Indonesia menggandengi pasukan NICA mendarat di Tanjung Priok. Tujuan Belanda adalah kembali mencoba mengambil Indonesia masuk ke dalam kekuasaan Belanda yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang. Oleh bantuan rakyat pribumi yang secara struktural pernah diberikan jabatan oleh Belanda dan menjadi perpanjangan tangan mereka, Belanda berhasil kembali masuk ke Indonesia. Sehingga berbagai pertikaian antara Indonesia dengan Belanda sering terjadi pada masa pemerintahan orde lama terkait dengan wilayah kekuasaan dan kedaulatan.

Pertikaian-pertikaian tersebut membuat Indonesia berada dalam kondisi tidak stabil, berbagai konfrontasi dilakukan oleh Belanda baik konfrontasi militer seperti agresi militer I pada tahun 1946 dan agresi militer II pada tahun 1947. Selain secara militer pertikaian Indonesia-Belanda juga terjadi dalam hubungan diplomasi. Diketahui terdapat beberapa kali diplomasi yang dilakukan seperti perjanjian Linggarjati pada tahun 1946 (Susilo & Wulansari, 2021), Perjanjian Renville pada tahun 1947 (Sarjono, 1999), Perjanjian Roem Royen pada tahun 1949 (Budiman, 2017) dan Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 yang mengubah Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara federasi serikat.

Menurut Widagdo dalam Libella (2020: 167) Pengakuan negara lain terhadap negara yang merdeka dapat diartikan sebagai suatu hal yang berguna untuk menjamin suatu negara dapat menempati dan menduduki wilayahnya dengan sesuai dan wajar sebagai suatu organisasi politik yang merdeka dan berdaulat ditengah bangsa dan negara-negara lain. Dengan pengakuan tersebut juga negara yang baru mendapatkan kemerdekaannya bisa mengadakan dan menghadiri berbagai hubungan dengan negara-negara lain seperti hubungan kerjasama tanpa khawatir akan terganggu atau terganggu oleh negara-negara berdaulat yang lain. Hal inilah yang dicoba dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada masa pasca kemerdekaan yaitu mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain terutama Belanda bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang berdaulat dan dapat menjalankan pemerintahan sendiri. Namun, Belanda tidak mengakui negara Indonesia sebagai negara kesatuan melainkan sebagai negara federal yang terbagi menjadi 16 negara bagian.

Pembahasan ini juga dilakukan di dalam sidang Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang mengeluarkan 5 point resolusi yang diantaranya adalah 1) Membebaskan semua tahanan politik; 2) Mengembalikan pemerintahan R.I yang dapat berfungsi bebas di Yogyakarta dan sekitarnya; 3) Mengadakan pemerintahan federal selambat-lambatnya pada tanggal 15 Maret 1949; 4) Mengadakan pemilihan umum untuk memilih konstituante yang harus selesai pada tanggal 1 Oktober 1949; 5) Pengembalian secara bertahap pemerintah Republik di lain daerah. Inidengan sendirinya penarikan mundur yang bertahap dari pasukan-pasukan Belanda (Budiman, 2017: 95-96). Sehingga hasil yang didapatkan dalam konferensi meja bundar atas desakan dari BFO, PBB dan Republik Indonesia menyepakati pengakuan secara *de jure* dan *de facto* terhadap Indonesia dan pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai bentuk realisasi hasil KMB maka pihak Belanda menyerahkan kedaulatan secara penuh kepada Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) (Tasnuri & Rijal, 2019: 65). Hal ini tentu tidak sesuai dengan konsensus bersama rakyat Indonesia yang telah disepakati pada tahun 1945 dan termuat dalam UUD 1945 bahwasanya Indonesia adalah negara berbentuk kesatuan.

M.Natsir adalah salah satu tokoh pahlawan yang telah memberikan kontribusi besar untuk Indonesia. Natsir dikenal sebagai seorang negarawan muslim, ulama, intelektual, tokoh pembaharu dan politisi kenamaan dunia Islam pada abad ke 20 ini. M. Natsir yang dikenal sebagai tokoh yang luar biasa dalam gagasan dan juga kepribadiannya tersebut banyak diberikan kepercayaan untuk membantu pemerintahan Indonesia pada masa awal

kemerdekaan hingga ia dipercayakan untuk menduduki jabatan – jabatan penting di republik Indonesia seperti Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), Menteri Penerangan (1946 – 1948), anggota DPRS dan Perdana menteri (1950 - 1951) (Setyaningsih, 2016: 75).

Salah satu gagasan yang pernah diberikan M. Natsir untuk Indonesia adalah Mosi Integral. Mosi Integral adalah gagasan politik yang dikeluarkan oleh M. Natsir untuk menyatukan negara-negara bagian yang berada dalam Republik Indonesia Serikat (RIS) untuk kembali melebur menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana sudah dijelaskan diatas bahwasanya retorika Belanda dalam politik internasional dalam mempertahankan Indonesia sebagai wilayahnya membawa Indonesia menjadi negara yang federal. Hal ini sangat tidak sesuai dengan gagasan para *Founding Father* Indonesia yang telah menyusun sedemikain baiknya bentuk negara Indonesia yang berada dalam negara kesatuan.

Mosi Integral tidak lahir dengan sendirinya. Pada saat M. Natsir melihat terjadinya situasi politik Indonesia yang tidak stabil dan tidak menentu arahnya bahkan kekhawatiran M. Natsir terkait ancaman perpecahan yang terjadi dikarenakan munculnya negara-negara kecil diberbagai daerah Indonesia. Hal ini disebabkan hasil Konverensi Meja Bundar di Den Haag yang melahirkan Republik Indonesia Serikat. M. Natsir melihat bahwa RIS adalah upaya Belanda untuk memecah belah Indonesia. Republik Indonesia Serikat dalam kacamata M. Natsir merupakan upaya Belanda untuk memecah belah Negara Indonesia. Dengan membentuk negara-negara bagian, artinya negara kesatuan ini dibagi-bagi menjadi terdiri dari negara-negara kecil. Dengan terbaginya negara Indonesia menjadi negara-negara bagian tersebut akan lebih mudah untuk kuasai dan diadu-dombakan kembali sehinga Indonesia dapat kembali diambil alih oleh Belanda. Oleh karena itu, kekhawatiran M. Natsir melihat situasi politik Indonesia yang demikian membawanya menemukan suatu gagasan untuk menyatukan kembali negara-negara bagian kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran M. Natsir melalui gagasannya yang bernama Mosi Integral yang berhasil menyatukan kembali Indonesia yang sebelumnya berada dalam bentuk negara-negara bagian. Penelitian ini hanya membahas tentang tokoh M. Natsir dalam perjuangannya pada tahun 1950 dalam mempersatukan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur dengan melakukan pengumpulan sumber-sumber dari kajian-kajian relevan yang telah ada sebelumnya yang kemudian dianalisis dengan pengkajian lebih dalam untuk melihat peran M. Natsir dalam melahirkan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah artikel-artikel dan buku-buku yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deksriptif yaitu penulis menjabarkan tentang peran M. Natsir pada tahun 1950 dalam mempersatukan kembali Indonesia menjadi negara kesatuan melalui gagasannya yang dikenal dengan mosi integral.

Hasil dan Pembahasan

Tentang M. Natsir

Mohammad Natsir merupakan anak dari Idris Sutan Saripado dan khadijah. Mohammad Natsir atau M. Natsir lahir pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 1908 di kampung Jembatan, Berukir Alahan Panjang yang merupakan wilayah Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Orang tua M. Natsir dikenal oleh banyak orang sebagai keluarga muslim yang taat. Ayah M. Natsir merupakan seorang juru tulis kontrolir di maninjau yang kemudian menjadi sipir atau penjaga tahanan, sedangkan ibunya merupakan keturunan Chaniago (Dzulfikriddin, 2010: 19).

Sebelum memasuki pendidikan formal, M. Natsir sudah mendapatkan pendidikan Islam sejak kecil dari orang tua dan lingkungannya. Sejak kecil ia sudah mendapatkan tradisi kesilaman yang kuat. Bahkan, sejak kecil M. Natsir sudah mampu menguasai ilmu-ilmu agama seperti bahasa arab dan juga kitab kuning.

M. Natsir memang memiliki semangat belajar yang sangat tinggi sejak kecil. Dengan semangat belajarnya tersebut ia dengan cepat bisa menguasai ilmu-ilmu yang dipelajari. M. Natsir sejak kecil memiliki cita-cita untuk menjadi seorang *meester in de rechten* (Mr). satu gelar yang dipandang hebat kala itu.

Pada tahun 1916-1923m M. Natsir memasuki sekolah dasar Belanda yang dikenal dengan HIS (*Hollands Inlandsche School*) di Solok. Sore harinya, ia menimba ilmu di madrasah Diniyah. Pada tahun 1923-1927 M. Natsir memasuki jenjang sekolah MULO (*Mer Utgerbreid Lager Pnderwijs*) di Padang. Kemudian, pada tahun 1927-1930, ia

memasuki jenjang sekolah lanjutan atas di AMS (*Algemene Middelbare School*) di Bandung (Husaini, 2020: 2-4).

Sebelum memasuki dunia politik, M. Natsir merupakan orang yang fokus di dalam dunia pendidikan. Terutama pendidikan Islam. Setelah menyelesaikan pendidikannya di AMS Bandung, M. Natsir mendapatkan kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi seperti *Rechts Hogeschool* [Sekolah Hukum] di Jakarta atau ke *Handels Hogeschool* [Sekolah Tinggi Hukum] di Rottterdam dengan beasiswa dari pemerintah Belanda. Namun, dia tidak mengambil kesempatan emas itu dan lebih memilih untuk menjadi guru agama dan juga sebagai seorang jurnalis.

Hal ini, terlihat dengan kesungguhan M. Natsir mendirikan Sekolah Pendidikan Islam (PENDIS) di Bandung pada tahun 1930, yang dimulai dari nol karena siswanya hanya ada lima orang. Kemudian sedikit demi sedikit akhirnya sekolah itu berkembang pesat sehingga tempat sekolahnya tidak mampu menampung siswanya yang berada di Simpang Jalan Pangeran Sumedang Bandung, kemudian pindah ke gedung yang lebih luas dan besar di Jalan Lengkong Besar Nomor 74 Bandung.

Pada tahun 1942- 1945 sebagai orang yang sangat intens di dalam dunia pendidikan dan pengalamannya dalam membina pendidikan Islam, M. Natsir diangkat sebagai kepala Biro pendidikan Kota Madya Bandung (Bandung Syiakusyo) M. Natsir dengan jabatan yang ia miliki juga mendirikan suatu Majelis. Tidak hanya berhenti disitu M. Natsir juga pernah menggagas mendirikan sebuah sekolah tinggi Islam bersama M. Hatta pada tahun 1945 (Rosidi, 1990).

Tidak hanya fokus dalam bidang pendidikan, M. Natsir juga merupakan orang yang aktif dalam suatu organisasi. Pada masa di MULO, M. Natsir sudah aktif di beberapa perkumpulan seperti *Pandu Nasinonal Islamische Pandivindrij* (NATIPI) dan perkumpulan *Jong Islamieten Bond* (JIB) cabang Padang. Ketika melanjutkan pendidikan di Bandung ia terpilih menjadi ketua JIB periode tahun 1928 sampai tahun 1932. Dari sinilah M. Natsir mulai mengenal para tokoh-tokoh politik bangsa saat itu seperti M. Natis bertemu dengan tokoh-tokoh Islam seperti Haji Agus Salim, H.O.S. Tjokrominoto, Syaikh Ahmad Syurkati, dan lain sebagainya (Dzulfikriddin, 2010: 20-22).

M. Natsir mulai memasuki dunia politik setelah Sabirin, ketua partai sarikat Islam mengajaknya masuk menjadi anggota (Memoar, 1993: 85). Ketika PSI/SPII terpecah belah oleh sebab-sebab intern dan ekstern, maka M. Natsir bergabung dengan Partai Islam

Indonesia (PII) yang didirikan oleh dr. Soekiman Wirjosandjojo, KH. Mas Mansur, R. Wiwohono, dan Ki Bagus Hadikusomo pada tahun 1939. Bahkan M. Natsir terpilih menjadi ketua PII cabang Bandung sampai masuknya pada tahun 1942 dan membubarkan semua partai politik yang ada pada saat itu (Dzulfikridin, 2010: 25).

Kemudian, M. Natsir juga aktif di Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang didirikan pada tanggal 21 September 1937 atas inisiatif KH. Mas Mansur (Muhammadiyah), KH. A. Wahab Chasbullah (NU), KH. A. Achmad Dahlan (nonpartai), dan Wondoamiseno (SI). Pada masa pendudukan Jepang MIAI diubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI) pada tanggal 7 November 1945 dan selanjutnya mengantarkan M. Natsir sebagai salah satu ketuanya hingga partai tersebut dibubarkan (Thohir Luth, 1999: 24).

Setelah kemerdekaan, M. Natsir diberikan kepercayaan untuk memegang beberapa jabatan politik negara. Pada tahun 1945 M. Natsir dipercaya menjadi anggota komita nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan juga terpilih sebagai anggota badan pekerjaan (BP-KNIP) yang kemudian diangkat menjadi seorang wakil badan ketua. M. Natsir juga dipercayakan menjadi menteri penerangan dari tahun 1946-1948 di dalam 4 kabinet yaitu Kabinet Syahrir I (3 Januari 1946 - 12 Maret 1946) Kabinet Syahrir II (12 Maret - 2 Oktober 1946), Kabinet Syahrir III (2 Oktober 1946 - 3 Juli 1947) dan Kabinet Hatta I (29 Januari 1948 - 4 Agustus 1949) dan menjadi DPRS serta perdana menteri pada tahun 1950-1951 (Dzulfikridin, 2010: 27-28). Sebagai politisi, Natsir pernah menduduki jabatan puncak partai Islam terbesar pada zamannya, yaitu Masyumi, dan pernah memperjuangkan Islam sebagai dasar negara (Tabroni, 2017: 41).

Mosi Integral M. Natsir

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian awal bahwa kondisi Indonesia pasca kemerdekaan berada dalam kondisi yang masih tidak stabil. Usaha-usaha negara barat seperti Belanda yang merupakan negara jajahan sebelumnya berusaha untuk bisa kembali mengambil alih Indonesia ke dalam genggamannya mereka. Maka manuver-manuver politik dilakukan untuk bisa mencapai tersebut.

Republik Indonesia Serikat merupakan produk Belanda yang di Inisiasi oleh Van Mook untuk membuat Indonesia menjadi negara yang terpecah setelah sebelumnya merupakan negara kesatuan. Dalam konsep ini dengan terpaksa Indonesia harus terbagi

menjadi 16 negara bagian. Bentuk negara seperti ini di kondisi Indonesia saat itu sangat rentan terjadinya kekacauan dan perpecahan dimana-mana.

M. Natsir sebagai politisi negara saat itu yang sekaligus memiliki jabatan sebagai parlementer melihat ini adalah upaya Van Mook untuk bisa memecah-belahkan Indonesia Dengan membentuk negara-negara bagian, artinya negara kesatuan ini dibagi-bagi menjadi terdiri dari negara-negara kecil.

Van Mook yang menjadi penggagas RIS menjadi orang yang paling bertanggungjawab atas terjadinya gejolak di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan tidak siapnya rakyat Indonesia untuk menjadi negara bagian. Ketidak siapan ini juga yang kemudian menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat secara luas. Maka apa yang terjadi kemudian adalah kerusuhan dan konflik sosial terjadi di mana-mana. Setiap daerah mengalami disorientasi, tidak jelas arah maka yang terjadi adalah konflik horizontal. Gejolak yang terjadi itu tentu saja karena Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau itu, berdasarkan hasil KMB dibagi menjadi 16 negara bagian, dan tentu saja rakyat Indonesia marah dan menolak.

Apa yang terjadi dengan Indonesia saat itu membuat M. Natsir menjadi sangat prihatin. M. Natsir yang merupakan anggota parlemen RIS saat itu merasa harus mencari tau secara langsung ke daerah-daerah tentang aspirasi dari masyarakat berkenaan dengan kondisi negara saat itu. Maka ketemu akhirnya, apa yang menjadi stimulus sebelum mosi integral itu lahir, berupa situasi bangsa Indonesia yang terancam terpecah belah akibat ulah Van Mook yang melahirkan RIS lewat momentum KMB di Den Haag Belanda. Dari KMB ini maka lahirlah negara-negara boneka, yang jika diselami lebih dalam dari hati nurani rakyatnya, sesungguhnya mereka tidak menerima hal itu terjadi. Maka mosi integral merupakan respon M. Natsir atas kondisi tersebut.

Menemukan kondisi tersebut dari masyarakat membuat M. Natsir harus merenung memikirkan sesuatu untuk dijadikan solusi dalam menyelesaikan masalah bangsa yang sangat besar saat itu. Pada saat itu M. Natsir menyusun sebuah konsep mosi yang kemudian dikenal dengan mosi integral hingga saat ini. Konsep ini lahir setelah M. Natsir mendengar aspirasi-aspirasi masyarakat yang menginginkan negara-negara bagian tersebut kembali bersatu ke dalam Republik Indonesia (Tabroni, 2017: 31).

Pada saat itu, menurut M. Natsir, masalah pokok yang harus dipecahkan adalah bagaimana membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). NKRI pada saat ini

merupakan jawaban dari persoalan dari kondisi politik yang ada. NKRI menginginkan terjadinya penggabungan negara-negara bahagian ke RI Yogyakarta atau langsung semua negara-negara bahagian ke NKRI.

Dalam prakteknya, konsep mosi integral adalah menyatukan seluruh daerah dilakukan secara damai. Jika ada konflik dalam penyatuan Negara Indonesia ini, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Maka, konsep mosi integral mencerminkan sebuah aspirasi bersama sehingga dapat diterima semua kalangan

Sebelum mosi integral tersebut dibacakan di parlemen terlebih dahulu M. Natsir melakukan lobi-lobi politik dengan fraksi-fraksi yang ada di parlemen yaitu dengan Kasimo dari partai Katolik, dengan tambunan dari partai Kristen, dengan PKI, dan yang lainnya serta negara-negara bagian. Dari pembicaraan dengan fraksi-fraksi itulah M. Natsir mendapatkan kesimpulan bahwa negara-negara bagian itu mau membubarkan diri bersatu dengan Yogyakarta tetapi tidak dengan cara bubar sendiri. Sepanjang dua setengah bulan, Natsir melakukan lobby yang diakuinya tidak mudah, terlebih-lebih dengan negara-negara bagian di luar Jawa seperti negara bagian di Sumatera dan Madura. Setelah semuanya dirasa mantap, Natsir mengajukan Mosi Integral yang menurut pengakuannya, dibuat “kaburkabur....” Mosi Integral dibikin kabur, karena kita tengah menghadapi Belanda. *“Jangan sampai nanti Belanda bikin kacau lagi. Belanda tidak boleh tahu, mau ke mana perginya rencana itu,”* kata Natsir. Saat itu, M. Natsir melakukan lobi dengan negara-negara bagian di dalam dan luar Jawa dengan menjaga agar tidak ketahuan oleh Belanda (Husaini, 2020: 12).

Setelah melakukan lobi dengan fraksi di parlemen RIS dan juga negara-negara bagian, Natsir harus datang ke Yogyakarta yang saat itu merupakan negara Republik Indonesia yang menjadi menjadi tempat negara-negara bagian untuk berhimpun. Namun, Yogyakarta tidak mau membubarkan diri. Sehingga M. Natsir harus meyakinkan pemimpinnya dengan menyampaikan *“Kita punya program menyatukan kembali semuanya, jadi kita bayar ini dengan sama-sama membubarkan diri”*.

Penolakan bukan hanya berada pada pemimpinnya tetapi juga berada pada masyarakatnya dikarenakan ketakutan masyarakat jika dibubarkan maka mereka akan kehilangan negara. Natsir harus menuntaskan pemahaman maksud dan tujuan dari mosi integral yang ia gagas dengan jurnalis-jurnalis dan orang-orang penting di Yogyakarta agar supaya bisa diterima dan melebur dengan negara negara bagian lainnya. Dalam hal ini

Natsir menyampaikan beberapa solusi untuk kepada pemimpin, orang-orang penting dan masyarakat Yogyakarta, diantaranya:

- a. Memerangi Pasundan, Negara Madura, Jawa Timur dan negara bagian lainnya. Solusi ini disampaikan oleh Natsir karena keyakinnya jika negara-negara bagian tersebut diperangi satu persatu maka mereka akan kalah dan kita akan bisa bersatu kembali.
- b. Mengajak negara-negara bagian untuk mau membubarkan diri dengan maksud bersatu. Sebagai tawaran untuk negara bagian mau menerima adalah menawarkan Soekarno-Hatta yang merupakan Dwi-Tunggal RIS dan RI sebagai presiden RI. Natsir yakin dengan mendorong mereka berdua sebagai presiden maka tidak akan ada yang bisa mengatakan tidak.

Setelah sebelumnya dilakukan lobi-lobi politik, Pada 2 April 1950 Mohammad Natsir menyampaikan pidato ‘mosi integral’ yang bersejarah tersebut, dengan beberapa butir latar pemikiran yang penting (1) Semua negara-negara bahagian mendirikan NKRI melalui prosedur parlementer, (2) Tidak ada satu negara bagian menelan negara bahagian lainnya dan (3) Masing-masing negara bahagian merupakan bahagian integral dari NKRI yang akan dibentuk. Maka pada 3 April 1950, M. Natsir membacakan konsepnya itu dalam sidang gabungan RIS-RI, yang kemudian dikenal dengan mosi integral. Apa yang menjadi gagasan besar dan kemudian dapat menyelamatkan bangsa ini tidak lain merupakan gagasan murni dari M. Natsir sendiri.

Karena sosialisasi yang baik terhadap gagasan besarnya itu, maka mosi integral Natsir diterima baik oleh pemerintah. Perdana Menteri RIS, Mohammad Hatta, mengumumkan bahwa pemerintah akan menggunakan Mosi Integral Natsir sebagai pedoman dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Dengan pendekatannya yang luwes, Natsir berhasil memulihkan negara federal RIS ke NKRI tanpa satu orang pun yang dipermalukan, juga tanpa setetes darah pun yang tumpah.

Ketika mosi integral Natsir diterima parlemen, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 negara kesatuan pun kembali berdiri, meskipun Irian Barat masih merupakan wilayah sengketa. Walaupun banyak yang melupakannya, namun tidak bisa dihapus dalam sejarah bangsa Indonesia bahwa mosi integral itu menjadi inspirasi penting untuk berdirinya Negara Indonesia yang kedua sehingga dipersatukan oleh tekad yang kuat. Seluruh isi ‘Mosi Integral M. Natsir’ tertuang dalam sebuah naskah autentik DPR Sementara RIS.

Kesimpulan

Mosi Integral merupakan gagasan penyatuan luar biasa yang disampaikan oleh M. Natsir. Esensi dari gagasan ini adalah persatuan kembali negara-negara bagian menjadi negara yang satu. Melalui gagasan ini, M. Natsir bisa meyakinkan berbagai pihak dari pemerintah, parlemen dan juga negara-negara bagian untuk kembali menjadi negara kesatu Republik Indonesia. Perjuangan M. Natsir dalam meyakinkan banyak pihak tidak mudah, karena juga terjadi beberapa penolakan dari negara-negara bagian. Namun, M. Natsir dengan solusi saling membubarkan diri dan mengangkat Soekarno-Hatta sebagai Presiden Republik Indonesia, penyatuan Indonesia berhasil dilakukan.

Ada beberapa bagian pemikiran penting oleh M. Natsir yang menjadi latar belakang Mosi Integral ini yaitu (1) Semua negara bagian mendirikan NKRI melalui prosedur parlementer, (2) tidak ada satu negara bagian yang menelan negara bagian yang lainnya, (3) masing-masing negara bagian merupakan bagian integral dari NKRI yang akan dibentuk.

Daftar Pustaka

- Ajip Rosidi (1990) *M. Natsir Sebuah Biografi*. Jakarta: Girisakti Pasaka
- Budiman, Agus (2017) *Sejarah Diplomasi Roem-Roijen Dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1949*. Wahana Pendidikan Volume (4), (1), pp. 96-97.
- Dzulfikriddin M. (2010) *Mohammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Libella, elsa, Fatimah Z. Salsabila, Regika. P. E. M. Putri. 2020. *Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional*. JJR (22), (2), p. 168
- Setyaningsih, Emi. 2016. *Perjuangan dan Pemikiran Politik Mohammad Natsir (1907-1993)*. TAPIS (12), (2), pp. 73-94.
- Sulardi. 2012. *Rekonstruksi Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasar UndangUndang Dasar 1945 Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*. Jurnal Konstitusi, (9), (3), p. 522.
- Susilo, Agus & Ratna Wulansari. 2021. *Perjanjian Linggarjati (Diplomasi dan Perjuangan Bangsa Indonesia Tahun 1946-1947)*. Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 10 (1).
- Tabroni. Roni. 2017. *Komunikasi Politik Mohammad Natsir*. Jurnal Ilmu Komunikasi, 1(1) (2017) pp. 39-60

- Tasnuri, Irvan & Muhammad Rijal Fadli. 2019. *Republik Indonesia Serikat: Tinjauan Historis Hubungan Kausalitas Peristiwa-Peristiwa Pasca Kemerdekaan Terhadap Pembentukan Negara RIS (1945-1949)*. Jurnal Candrasangkala Vol. 5, No. 2.
- Thohir Luth (1999) *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Wayan, I, Pardi. 2019. *Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945: Diskursus Pembukaan UUD 1945 Dalam Perspektif Sejarah*. *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah* (II), (2), p. 97.
- Yasmis (2009) *Jepang dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jurnal Sejarah Lontar, (4) (2), p. 27.